

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Agregat

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam, sumber daya manusia (*human resources*) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Todaro, 2000).

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999).

Pada saat ini tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif, namun beberapa teori secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah.

Glasson (1977) menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang harus memperhitungkan faktor-faktor yang dianalisis jangka pendek diasumsikan konstan, yakni seperti penduduk, upah, harga, teknologi dan distribusi pendapatan. Mobilitas faktor-faktor terutama tenaga kerja dan modal harus menjadi pertimbangan yang sangat penting.

Pada umumnya orang sependapat bahwa pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen maupun eksogen yakni faktor-faktor yang terdapat pada daerah yang bersangkutan ataupun factor-faktor di luar daerah

atau kombinasi dari keduanya. Faktor-faktor penentu penting penting dari dalam daerah meliputi distribusi faktor-faktor seperti tanah, tenaga kerja dan modal, sedangkan salah satu faktor penentu dari luar daerah yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditas yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Suatu pendekatan yang lebih baru untuk menjelaskan faktor penentu endogen dari pertumbuhan ekonomi regional adalah melalui penggunaan model ekonomi makro.

Model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha menjelaskan output regional menurut faktor-faktor regional tertentu yang masing-masing dapat dianalisa secara sendiri-sendiri (Glasson,1977) dan dapat ditulis sebagai berikut :

$$O_n = f_n (K, L, Q, Tr, T, So) \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

O_n = Output potensial dari daerah n

K = Modal (Capital)

L = Tenaga Kerja (Labor)

Q = Tanah (SDA)

Tr = Sumberdaya pengangkutan

T = Teknologi

So = Sistem Sosial Politik

3) Apabila dirumuskan menurut faktor-faktor yang lebih penting dan lebih mudah dikuantitatifkan, maka rumus persamaan mengenai pertumbuhan dapat dinyatakan sebagai contoh:

$$O_n = a_n k_n + (1 - a_n) l_n + t_n \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

O, k, l, t = tingkat pertumbuhan output, modal, tenaga kerja dan teknologi

a = bagian pendapatan yang diperoleh modal (yakni produk marginal dari modal)

Rumus : $PDRB = NT_1 + NT_2 + \dots + NT_n$

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Indikator agregat ekonomi makro yang lazim digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu wilayah adalah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk

tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat propinsi/kabupaten. PDRB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu biasanya satu tahun (Yuliadi, 2007).

Indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya, atau jumlah total alokasi output tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan : Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah merupakan hasil pengurangan *output* dengan *input*. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha yaitu : (Putong, 2002)

- 1) Pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.
- 2) Pertambangan dan galian.
- 3) Industri pengolahan.
- 4) Listrik, gas dan air minum.
- 5) Bangunan dan konstruksi.
- 6) Perdagangan, hotel dan restoran.
- 7) Angkutan dan komunikasi.
- 8) Keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan.
- 9) Jasa-jasa.

Rumus : $PDRB = NT_1 + NT_2 + \dots + NT_n$

$$\text{Atau } PDRB = \sum_{i=1}^n NT_i$$

Dimana :

$NT_i = NO_i - NI_i$

NT_i : Nilai tambah sektor i

NO_i : Nilai output suatu sektor i

NI_i : Nilai input sektor i

Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator utama karena memberikan implikasi pada kinerja perekonomian makro yang lain. Pertumbuhan ekonomi merefleksikan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin berkembangnya aktivitas perekonomian baik aktivitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yaitu PDRB harga konstan yang di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rumus : } LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \quad (\text{Murni, 2006})$$

Dimana :

LPE : pertumbuhan Ekonomi

t : tahun tertentu

t-1 : tahun sebelum t

Selanjutnya, usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu caranya adalah dengan melakukan pembangunan ekonomi di segala bidang, sehingga diharapkan akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno (1985) bahwa pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dalam pengertian tersebut terkandung makna bahwa peningkatan pendapatan masyarakat yaitu tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) pada suatu tahun tertentu melebihi dari tingkat pertambahan penduduk. Atau perkembangan *Gross Domestic Product* (GDP) yang berlaku dalam suatu masyarakat diikuti oleh perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya, yang pada umumnya masih bercorak tradisional. Jadi suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita penduduk menunjukkan kecenderungan (*trend*) jangka panjang yang semakin meningkat.

Adapun tujuan atau arah dari pada pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat daerah dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kualitas hidup, ketrampilan, prakarsa dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparatur pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing guna

mempercepat laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2000).

Menurut Todaro (2000), salah satu model dasar teori tentang pembangunan yang memusatkan perhatian pada transformasi structural (*Structural Transformation*) suatu perekonomian sub sistem dirumuskan oleh W. Arthur Lewis yang kemudian dikenal dengan model dua sector sebagian tenaga kerja tersebut keluar dari sektor pertanian maka sektor itu tidak akan kehilangan outputnya sedikitpun.

2.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Biasanya indikator ini digunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat kemakmuran sosial ekonomi penduduk. Data tersebut diperoleh dengan cara membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

$$\text{Rumus : PDRB per Kapita} = \frac{\text{Total PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk pertengahan tahun}}$$

Sebagai gambaran yang sederhana, apabila nilai nominal PDRB cukup besar sedangkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut kecil, maka PDRB per kapitanya akan menjadi besar. Sebaliknya apabila nilai nominal PDRB kecil sedangkan jumlah penduduk besar, maka PDRB per kapita menjadi kecil. Oleh sebab itu besar kecilnya PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah penduduk. Selain itu angka PDRB juga menjadi ukuran kemakmuran suatu daerah, akan tetapi data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan karena pada dasarnya pemilik pendapatan tersebut adalah mereka yang memiliki faktor produksi.

2.4. Dengan tersedianya data PDRB perkapita menurut kabupaten/propinsi dalam kurun waktu yang relatif panjang akan sangat membantu para pembuat kebijakan, praktisi pembangunan dan pengamat masalah-masalah sosial ekonomi dalam melakukan perbandingan baik antar waktu maupun antar kabupaten/propinsi.

2.3. Produk Unggulan Daerah

Untuk mengukur peranan sektor ekonomi unggulan daerah menggunakan teknik location quation (LQ) yaitu merupakan suatu indikator yang menunjukkan atau

besar kecilnya peranan satu sektor dalam daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain (Tarigan, 2005).

Bagian LQ adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Dengan kata lain, LQ dapat menghitung perbandingan antara *share output* sektor *i* di kota dan *share output* sektor *i* di provinsi:

Formula LQ :

$$LQ = \frac{X^i / RVr}{X^n / RVn} \quad (\text{Kuncoro, 2004})$$

Dimana :

X^i = nilai produksi subsektor *i* pada daerah Kabupaten

RVr = Total PDRB Kabupaten

X^n = nilai produksi subsektor *i* pada daerah Propinsi

RVn = Total PDRB Propinsi

Kriteria pengukuran nilai LQ yang dihasilkan mengacu kepada kriteria sebagai berikut :

1. Jika $LQ > 1$ berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat propinsi.
2. Jika $LQ < 1$ berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat propinsi.
3. Jika $LQ = 1$ berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama dari sektor yang sama pada tingkat propinsi.

2.4. Ekonomi Masyarakat

Menurut Mubyarto (1996) ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang berbasiskan pada kekuatan rakyat. Kekuatan dan daya tahan ekonomi rakyat terletak pada kemampuannya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Adapun ciri-ciri ekonomi kerakyatan mempunyai; 1) Dilakukan oleh rakyat tanpa modal besar; 2) Dikelola dengan cara-cara swadaya; 3) Bersifat mandiri sebagai ciri khasnya; 4) Tidak ada buruh dan tidak ada majikan; dan 5) Tidak mengejar keuntungan.

Menurut Sutisno, pola pengembangan ekonomi kerakyatan harus diprioritas melalui keberpihakkan kepada sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Bagaimanapun, saat ini sektor UKM memegang peran penting yang sangat sentral dan strategis dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Sektor UKM akan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan bisa diharapkan dalam bangkitnya sektor riil di Indonesia. Pengembangan dan pemberdayaan pengusaha Indonesia khususnya UKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, memegang peran penting. Pelaku usaha di negara berkembang termasuk Indonesia, sangat didominasi para pengusaha kecil dan menengah (UKM). Oleh karena itu, eksistensi UKM yang ada saat ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian nasional. Dalam memeberdayakan UKM sebagai tulang punggung pengembangan ekonomi kerakyatan harus diperhatikan kelemahan dan kendala yang dihadapi. (Rintuh dan Miar, 2005).

Adapun kriteria usaha kecil menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah pada pasal 6 adalah :

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha atau ;

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima rauts juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Research), untuk itu perlu ditetapkan, antara lain:

2.6. HIPOTESIS

1. Diduga sektor pertanian dan perikanan mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir pada Kabupaten Bengkulu.

2. Diduga model kemitraan dan sinergi antar lembaga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir pada Kabupaten Bengkulu.

3.2. Jenis, Sumber Data dan Variabel yang diukur

Variabel yang diukur dalam studi ini adalah variabel yang diperlukan untuk menilai kelayakan suatu pembangunan yang meliputi kelayakan usaha dan kelayakan berkembang di masa depan. Untuk mengetahui ketiga kelayakan tersebut maka diperlukan data yang dapat memberikan informasi dalam studi ini, antara lain: (1) data kebijaksanaan pembangunan daerah; (2) data wilayah yang mempunyai indikasi potensial untuk pengembangan; (3) data ekonomi wilayah; (4) kondisi sosial dan kependudukan; (5) pola kegiatan usaha, kesesuaian lahan dan keunggulan komparatif; (6) data kelayakan usaha potensial/komoditas unggulan (7) data kependudukan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan data primer dan sekunder. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (*assessment*) secara umum di lapangan. Selain dari data primer juga diperlukan data sekunder yang dikumpulkan dari dinas dan instansi yang terkait. Dimana data sekunder ini akan dikonfirmasi dengan informasi dan data primer yang didapatkan di tingkat lapangan.